

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT  
KABUPATEN ACEH BESAR (STUDI KASUS PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT  
NASIONAL KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH)**

**MUHAMMAD ALFURQANI SARWAN**

**NPP. 32.0027**

**Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh  
Program Studi Politik Indonesia Terapan**

**Email: [furqani.salwan@gmail.com](mailto:furqani.salwan@gmail.com)**

**Dosen Pembimbing Skripsi : Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM**

***ABSTRACT***

***Problem Statement/Background (GAP):*** The low level of political education in Aceh Besar Regency has led to a correspondingly low level of public political participation. Political education is a crucial factor in increasing public involvement in political processes. Political parties, as key actors in a democratic system, play a strategic role in providing political education to the public. ***Purpose:*** This study aims to analyze the implementation of political education by the National Mandate Party (Partai Amanat Nasional) in enhancing political awareness among the people of Aceh Besar Regency. Rusadi Kantaprawira's theory is used as the analytical framework to examine the forms of political education provided. ***Method:*** This research employs a qualitative descriptive approach, using triangulation methods consisting of interviews, observations, and documentation. ***Result:*** The findings reveal that the National Mandate Party has conducted various political education programs through print media, audio-visual media, and direct engagement. ***Conclusion:*** Political education through print media is considered in-depth but less practical for individuals with limited time. Audio-visual media is more preferred due to its accessibility and ease of understanding. Meanwhile, direct political education is viewed as highly effective due to its interactive and in-depth nature, although it is not always accessible to all segments of society. Supporting factors in the implementation of political education include the commitment and enthusiasm of party members, as well as legal support. The inhibiting factors include

*difficult geographical access and limited financial resources. Based on these findings, it is recommended that the public increase their political awareness by actively participating in political activities and showing greater concern for political issues and government policies.*

**Keyword:** *Political Parties, Political Education, Democracy*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Rendahnya pendidikan politik di Kabupaten Aceh Besar berdampak pada minimnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Teori Rusadi Kantaprawira digunakan sebagai landasan untuk mengkaji bentuk-bentuk pendidikan politik yang diberikan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik bagi masyarakat melalui media cetak, media audio-visual, dan kegiatan langsung. **Kesimpulan:** Pendidikan politik melalui media cetak dinilai cukup mendalam, namun kurang praktis bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Media audio-visual lebih disukai karena mudah diakses dan dipahami. Sementara itu, pendidikan politik secara langsung dianggap sangat efektif karena bersifat interaktif dan mendalam, meskipun masih belum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik oleh partai antara lain adalah komitmen dan antusiasme anggota partai serta dukungan regulasi. Sedangkan hambatan yang dihadapi mencakup medan geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran politik dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik serta lebih peduli terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik, Partai Politik, Demokrasi

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi di Indonesia menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan politik yang inklusif dan berkeadilan. Sejak era reformasi, pemilihan umum secara langsung telah menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya. Namun demikian, rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat di berbagai daerah masih menjadi persoalan serius. Masyarakat kerap kali belum memahami hak dan kewajiban politik mereka secara utuh, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat partisipasi politik yang belum maksimal. Kristiyanto (2023) menyatakan bahwa demokrasi politik di Indonesia pada era reformasi menunjukkan gambaran yang berbeda dari masa sebelumnya, di mana partai-partai mengalami guncangan karena pergeseran rezim dari demokrasi yang dikendalikan dan represif menjadi demokrasi liberal yang berfokus pada fungsi elektoral. Pergeseran ini memaksa partai politik untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan baru dalam sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Menurut Amal (2014), demokrasi Indonesia menjamin kebebasan partisipasi tanpa tekanan, tetapi tetap membutuhkan pendidikan politik yang memadai agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara optimal. Sebagai contoh di Amerika kontrol partai politik dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Chen,et.al, 2021) . Hal senada juga dikatakan oleh Sirivunnabood, P. (2016) bahwa pendidikan politik merupakan salah satu elemen pendidikan masyarakat. Asshiddiqie (2007) menambahkan bahwa demokrasi juga menuntut terwujudnya supremasi hukum sebagai fondasi sistem pemerintahan yang adil dan terbuka. Pendidikan politik adalah proses pemberian pengetahuan dan pemahaman terkait sistem politik, kewarganegaraan, serta partisipasi politik. Hal ini ditujukan untuk membentuk warga negara yang sadar dan aktif secara politik (Chen, 2024)

Partai politik adalah kelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan atas pemerintahan untuk pemimpin partainya. Melalui kekuasaan ini, partai tersebut memberikan manfaat, baik yang bersifat ideal maupun materiil, kepada para anggotanya (Friedrich, 1963). Menurut Carr (1961) partai politik adalah sebagai organisasi yang berupaya mengendalikan atau mempengaruhi pemerintahan, terutama melalui proses pemilihan umum. Partai politik bertujuan untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilihan agar dapat menempatkan anggotanya di posisi pemerintahan dan menjalankan agenda politik mereka. Carr menekankan bahwa

partai politik memainkan peran penting dalam menyalurkan aspirasi rakyat, membentuk kebijakan, serta menyediakan wadah bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam regulasi ditegaskan bahwa salah satu fungsi partai adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi ini belum berjalan maksimal, khususnya di tingkat lokal. Kabupaten Aceh Besar menjadi contoh yang menarik untuk diteliti karena dinamika politiknya yang kompleks, termasuk persaingan antara partai politik nasional dan lokal. Data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar tahun 2024 menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) mendominasi perolehan kursi DPRD, mengungguli partai-partai lokal seperti Partai Aceh. Kondisi ini menunjukkan adanya keberhasilan PAN dalam membangun basis dukungan politik, namun perlu dikaji lebih lanjut apakah keberhasilan tersebut berkaitan dengan efektivitas pendidikan politik yang dilakukan.

Fenomena rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat Aceh Besar, termasuk adanya pandangan apatis bahwa pergantian pemimpin tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka, menunjukkan urgensi pelaksanaan pendidikan politik yang lebih menyentuh dan merata (Andika, M., & Setyasih, E. T, 2024). Nurdiansyah (2015) menyatakan bahwa pengetahuan politik masyarakat Indonesia masih rendah dan sering kali dimanfaatkan sebagai komoditas oleh elite politik. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana partai politik, khususnya PAN, menjalankan fungsi pendidikan politiknya, metode yang digunakan, serta tanggapan masyarakat terhadap upaya tersebut. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi peran partai dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Meskipun partai politik memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat, pelaksanaan fungsi ini masih belum berjalan secara optimal di tingkat daerah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya partisipasi politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta proses demokrasi yang sedang berlangsung. Hal ini menciptakan celah dalam pembangunan kesadaran politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama partai politik.

**Tabel 1**

No	Partai Politik	2014–2019	2019–2024	2024–2029
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	1	6
2	Partai Gerindra	1	3	0
3	Partai Golkar	5	3	2
4	Partai NasDem	5	1	3
5	Partai Keadilan Sejahtera	3	5	5
6	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	2
7	Partai Amanat Nasional	4	7	8
8	Partai Demokrat	1	3	3
9	Partai Aceh	9	5	7
10	Partai Darul Aceh	3	4	1
11	Partai Nasional Aceh	2	2	0
12	Partai Bulan Bintang	1	1	2
13	Partai Gelombang Rakyat	–	–	1

**Sumber: KIP Aceh Besar 2024**

Di Kabupaten Aceh Besar, Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil meraih perolehan suara tertinggi dalam dua periode pemilu terakhir. Namun, belum diketahui secara jelas bagaimana PAN menjalankan peran edukatifnya dalam mendukung peningkatan kesadaran politik masyarakat. Ketiadaan kajian yang mendalam mengenai bentuk, strategi, media, serta efektivitas pelaksanaan pendidikan politik oleh PAN menjadi masalah yang perlu diangkat. Dengan demikian, kesenjangan yang diambil dalam penelitian ini adalah belum adanya pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Aceh Besar, baik dari sisi pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi, maupun tanggapan masyarakat terhadap upaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan gambaran nyata atas kontribusi partai politik dalam membangun budaya demokrasi di tingkat lokal.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Pasaribu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik* menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik. Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang serupa, objek penelitian tersebut tidak spesifik sehingga ruang lingkupnya cenderung umum. Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan mengambil objek dan lokasi yang lebih terfokus untuk menghasilkan analisis yang kontekstual. Setyasih, E. T. (2023) mengatakan bahwa dengan mengurangi penyakit birokrasi seperti halnya mengurangi apatisme masyarakat dalam partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas birokrasi yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Sahabuddin dkk. (2020) dalam penelitian mengenai *Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kecamatan Campalagian* menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh partai masih sangat lemah. Masyarakat cenderung memandang partai hanya sebagai alat kepentingan elite. Fokus kajian memang serupa, namun perbedaan terletak pada wilayah dan karakter sosial politik masyarakat yang diteliti. Penelitian ini hadir dengan konteks wilayah berbeda dan mengaitkan secara lebih langsung antara pelaksanaan pendidikan politik dengan persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pratiwi dkk. (2020) juga meneliti pendidikan politik oleh partai, namun fokus mereka tertuju pada generasi muda sebagai sasaran utama. Meskipun metode yang digunakan serupa, penelitian ini berbeda dalam fokus populasi dan pendekatan normatif yang digunakan. Penelitian ini memperkaya wacana dengan mengkaji masyarakat secara umum, bukan hanya kelompok usia tertentu, serta memperkuat pendekatan melalui payung hukum yang relevan.

Penelitian lain oleh Saputro (2015) yang dilakukan di DPD II Partai Golkar Kota Malang menyimpulkan bahwa pendidikan politik cenderung bersifat simbolik dan pencitraan, belum menyentuh aspek substansial seperti nilai demokrasi dan pemahaman kewarganegaraan. Berbeda dari itu, penelitian ini lebih menekankan evaluasi terhadap **implementasi aktual** pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik serta pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks lokal.

Terakhir, penelitian oleh Kusuma dkk. (2024) menyoroti pentingnya berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan pertunjukan seni sebagai sarana pendidikan politik. Fokus mereka berada pada jenis dan bentuk kegiatan. Namun, penelitian ini menawarkan pendekatan berbeda dengan

melihat efektivitas implementasi pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat secara lebih terukur dan kontekstual di wilayah studi yang spesifik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus wilayah studi yang spesifik dan belum banyak dikaji, pendekatan interdisipliner antara aspek hukum dan politik, serta analisis mendalam terhadap efektivitas implementasi pendidikan politik oleh partai politik dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian pendidikan politik lokal dengan mengkaji secara khusus peran Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Aceh Besar. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang bersifat umum atau fokus pada generasi muda, studi ini menyoroti konteks geografis dan institusional yang spesifik, yakni dominasi PAN dalam dua periode pemilu terakhir. Kebaruan terletak pada pendekatan komprehensif yang mencakup evaluasi bentuk pendidikan politik (media cetak, audio-visual, dan langsung), respons masyarakat, serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya. Penelitian ini menyajikan model implementasi pendidikan politik yang dapat menjadi referensi untuk memperkuat demokrasi lokal berbasis partisipasi masyarakat.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Aceh Besar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, dengan fokus pada bentuk pendidikan politik yang dilakukan melalui media cetak, audio-visual, dan interaksi langsung kepada masyarakat.

## **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deduktif untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian kualitatif bersifat umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu sosial humaniora dalam aturan kajian mikro (Harahap, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengumpulan data lapangan yang bersifat alami. Lokasi penelitian berada di wilayah administratif

Kabupaten Aceh Besar, dengan pelaksanaan penelitian menyesuaikan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2024/2025.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, dokumen instansi, serta arsip resmi lainnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, yaitu anggota DPRK sekaligus pengurus DPD PAN Kabupaten Aceh Besar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan empat orang masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan *snowball sampling* berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin untuk menggali informasi secara mendalam, observasi terhadap kegiatan dan kondisi lapangan, serta dokumentasi berupa foto dan dokumen resmi dari KIP maupun instansi terkait lainnya (Arikunto, 2022). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dilengkapi dengan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar**

Kabupaten Aceh Besar terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan mengelilingi Kota Banda Aceh. Wilayah ini memiliki luas 2.903,49 km<sup>2</sup> dengan topografi yang bervariasi dari pesisir hingga dataran tinggi, serta terdiri atas 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 desa. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 442.987 jiwa, dengan persebaran terbanyak di Kecamatan Darul Imarah dan terendah di Kecamatan Leupung. Kondisi pendidikan di kabupaten ini cukup baik dengan tersedianya fasilitas sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Pemerintah daerah terus meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan fasilitas belajar untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara ekonomi, masyarakat Aceh Besar banyak yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan, meskipun tingkat pengangguran, terutama di kalangan perempuan, masih menjadi tantangan. Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan menjalankan aktivitas keagamaan secara aktif,

dengan toleransi antarumat beragama yang tetap terjaga. Pemerintah daerah mengusung visi “Mewujudkan Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat Berdasarkan Syariat Islam,” yang didukung oleh lembaga seperti Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan memberikan pendidikan politik. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai dominan di kabupaten ini, dengan perolehan kursi DPRD terbanyak selama dua periode terakhir, yang mencerminkan kekuatan politik dan kepercayaan masyarakat terhadap peran aktif partai dalam dinamika lokal.

### **3.2 Analisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik di Kabupaten Aceh Besar**

Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Aceh Besar menjalankan pendidikan politik melalui tiga pendekatan utama sesuai dengan konsep pendidikan politik yang dikemukakan oleh Kantaprawira (1988), yaitu: media cetak, media audiovisual, dan pendidikan politik secara langsung. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman politik, kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong partisipasi dalam proses demokrasi.

#### **1. Media Cetak**

PAN memanfaatkan spanduk dan baliho sebagai sarana pendidikan politik dalam bentuk media cetak. Spanduk digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang bersifat umum dan menjangkau masyarakat di ruang publik (Setyasih, E. T, 2023). Media ini dianggap efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik serta menekan biaya kampanye. Sementara itu, baliho digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang lebih kompleks dan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih teredukasi. Baliho memiliki kekuatan dalam menyampaikan informasi yang lebih mendalam, meskipun membutuhkan biaya produksi dan pemasangan yang lebih tinggi dibandingkan spanduk.

#### **2. Media Audiovisual**

Dalam kategori audiovisual, PAN memanfaatkan media sosial Instagram sebagai platform penyebaran informasi politik. Akun resmi @bm\_panaceh digunakan untuk menjangkau masyarakat, khususnya generasi muda, dengan konten yang bersifat informatif dan mudah diakses. Penggunaan Instagram memungkinkan interaksi dua arah, di mana masyarakat tidak

hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan respon atau pertanyaan. Media ini dinilai efektif dalam membangun komunikasi politik yang cepat dan luas, meskipun aktivitasnya masih tergolong belum maksimal.

### 3. Pendidikan Politik Langsung

Selain media, PAN juga secara aktif melakukan pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi dan seminar politik. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, di desa-desa atau gampong, untuk bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban politik, sistem pemilu, dan isu-isu lokal hingga nasional. Sosialisasi ini juga digunakan untuk membangun citra positif partai dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Sementara itu, seminar diselenggarakan secara periodik dan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang politik. Seminar ini diikuti oleh berbagai kalangan seperti mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum. Kelebihannya adalah penyampaian materi yang lebih komprehensif dan adanya forum diskusi, yang mendorong pertukaran ide dan memperdalam pemahaman politik peserta. Namun demikian, tantangan dalam kegiatan ini meliputi keterbatasan anggaran serta keharusan menjaga netralitas dalam penyampaian materi

## 3.3 Faktor Pendukung Pendidikan Politik oleh Partai Politik

### Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia: PAN dan Kesbangpol memiliki kader dan pegawai dengan kualifikasi akademik serta pengalaman yang memadai.
2. Kelembagaan: Struktur organisasi yang baik mendukung pelaksanaan program secara sistematis

### Faktor Eksternal

1. Partisipasi Masyarakat: Terjadi peningkatan partisipasi pemilih dari 67,9% (2022) menjadi 77,6% (2024)
2. Dukungan Media: Kerjasama dengan media lokal sangat mendukung penyebaran materi pendidikan politik.

### **Solusi yang Diterapkan**

1. Pelatihan kader
2. Pemanfaatan media secara kreatif
3. Membangun kemitraan antar lembaga dan transparansi dalam program

### **3.4 Faktor Penghambat Pendidikan Politik oleh Partai Politik**

#### **Internal**

1. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan minimnya kader terlatih.
2. Komitmen Rendah: Pendidikan politik belum jadi prioritas partai.
3. Sasaran Tidak Jelas: Tidak semua program sesuai kebutuhan lokal.
4. Koordinasi Lemah: Kurangnya sinergi antar elemen internal partai

#### **Eksternal**

1. Apatisme Masyarakat: Tingkat ketidakpedulian terhadap politik cukup tinggi.
2. Hambatan Akses: Sulitnya menjangkau wilayah terpencil terutama saat musim hujan.
3. Persaingan Antar Lembaga: Adanya tumpang tindih program.
4. Intervensi Pemerintah: Pengaruh eksternal pemerintah kadang mengganggu independensi pelaksanaan pendidikan politik.

#### **Solusi atas Hambatan**

1. Peningkatan kapasitas internal
2. Penajaman target program
3. Sinergi lintas sektor
4. Pendekatan berbasis kepercayaan publik menjadi fokus utama perbaikan

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Badan Kesbangpol Aceh Besar telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. PAN memanfaatkan media sosial, media cetak, serta metode tatap muka seperti seminar dan diskusi publik sebagai sarana

pendidikan politik. Hal ini seperti yang juga pernah dilakukan oleh partai Golkar dalam pemilu tahun 2019 (Sabir,et.al. 2022) . Dengan cara ini juga terbukti mampu menaikkan minat generasi muda swedia dalam berpartisipasi aktif di dunia politik (Bladh, 2022) Respon masyarakat terhadap kegiatan ini cukup baik, terutama terhadap media audiovisual dan kegiatan langsung yang bersifat interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan teknologi informasi dan pendekatan partisipatif lebih efektif dalam menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung seperti kualitas sumber daya manusia, struktur kelembagaan yang kuat, serta kolaborasi antar instansi dan peran media lokal. Namun, pelaksanaan pendidikan politik juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kader terlatih, serta tingkat apatisme politik sebagian masyarakat. Meskipun begitu, strategi seperti pelatihan kader, sinergi lintas sektor, dan pemanfaatan media sosial menjadi solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, pendidikan politik oleh PAN dan Kesbangpol telah membantu menguatkan demokrasi lokal, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan dalam aspek distribusi, intensitas, dan kualitas pelaksanaan programnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Badan Kesbangpol Aceh Besar telah melaksanakan pendidikan politik melalui berbagai metode, seperti media cetak, audiovisual, dan interaksi langsung. Upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu politik. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun saling melengkapi dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat.

Faktor pendukung keberhasilan pendidikan politik di Kabupaten Aceh Besar meliputi kualitas kader, dukungan finansial, dan komitmen dari partai sebagai faktor internal, serta peran pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dukungan media sebagai faktor eksternal. Kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik, partisipasi aktif, dan penguatan demokrasi lokal.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan politik mencakup keterbatasan kader, dana yang terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga. Meskipun demikian, program pendidikan politik tetap berjalan berkat upaya yang dilakukan oleh PAN dan Kesbangpol, serta didukung oleh strategi yang diarahkan untuk mengatasi kendala tersebut.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada PJ Bupati Aceh Besar beserta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen Pembimbing, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M., & Setyasih, E. T. (2024). Pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik (Studi Partai Demokrat dan Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh). *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 1–7. [http://eprints.ipdn.ac.id/17916/1/MUHAMMAD%20ANDIKA\\_31.0021\\_PENDIDIKAN%20POLITIK%20BAGI%20MASYARAKAT%20OLEH%20PARTAI%20POLITIK%20%28STUDI%20PARTAI%20DEMOKRAT%20DAN%20PARTAI%20ACEH%20.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17916/1/MUHAMMAD%20ANDIKA_31.0021_PENDIDIKAN%20POLITIK%20BAGI%20MASYARAKAT%20OLEH%20PARTAI%20POLITIK%20%28STUDI%20PARTAI%20DEMOKRAT%20DAN%20PARTAI%20ACEH%20.pdf)
- Amal, I. (2014). *Teori-Teori Mutakbir Partai Politik*. Tiara Wacana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Bladh, D. (2022). Party functions and party education in the political landscape of Sweden. *International Journal of Lifelong Education*, 41(4), 435–449. <https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2104397>
- Chen, M., & Madni, G. R. (2024). *Unveiling the role of political education for political participation in China*. *Heliyon*, 10(10), e31258. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31258>
- Chin, M. J., & Shi, L. (2021). The impact of political party control on education finance and outcomes: Evidence from U.S. states (EdWorkingPaper: 21-280). Annenberg Institute at Brown University. <https://doi.org/10.26300/kvw2-5725>
- Carr, Robert K. (1961). *American Democracy in Theory and Practice: National, State, and Local Government*. United State of America: Library of Congress Catalog.
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*, New York: McGraw Hill
- Harahap, N M. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing

- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164–169. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(1), 54–58. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.56>
- Pasaribu, P. (2017, November). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. (n.d.). *Peran partai politik dalam pendidikan politik bagi generasi muda*. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://jurnal.ppkn.org/index.php/jppkn/article/view/79>
- Rusadi, K. (1988) *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung.
- Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*. Sinar Baru Algensindo
- Sabir, A., Murni, Y., Afrianti, R., Mufti, D., Yanti, F., & Fauziah. (2022). The political education strategy of the Golkar Party for constituents: Challenges and its impact on local political participation. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(1). <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1462>
- Sahabuddin C, dkk. "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kecamatan Campalagian." *Journal Peqguruang*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 494-499, doi:[10.35329/jp.v2i2.1277](https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1277).
- Saputro, Y. D. (2015). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan -21(1), 34-42. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=368780&val=7132&titl>

[e=PERAN%20PARTAI%20POLITIK%20DALAM%20PENDIDIKAN%20POLITIK%20GENERASI%20MUDA%20DAN%20IMPLIKASINYA%20TERHADAP%20KETAHANAN%20POLITIK%20WILAYAH%20Studi%20Di%20DPD%20II%20Partai%20Golongan%20Karya%20Kota%20Malang%20Jawa%20Timur%20Tahun%202009%20-%202014](#)

Setyasih, E. T. (2023). Democracy in the digital era as a challenge and opportunity for public participation. *Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1).

<https://doi.org/10.15575/jpan.v15i1.24553>

Setyasih, E. T. (2023). Creating an effective bureaucracy by reducing bureaucratic pathology in local governments. *Influence: International Journal of Science Review*, 5(1), 137–143.

<https://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/112>

Sirivunnabood, P. (2016). Political education: The role of political parties in educating civil society on politics. *Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts*, 16(3), 157–194.

<https://thaiscience.info>

